

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

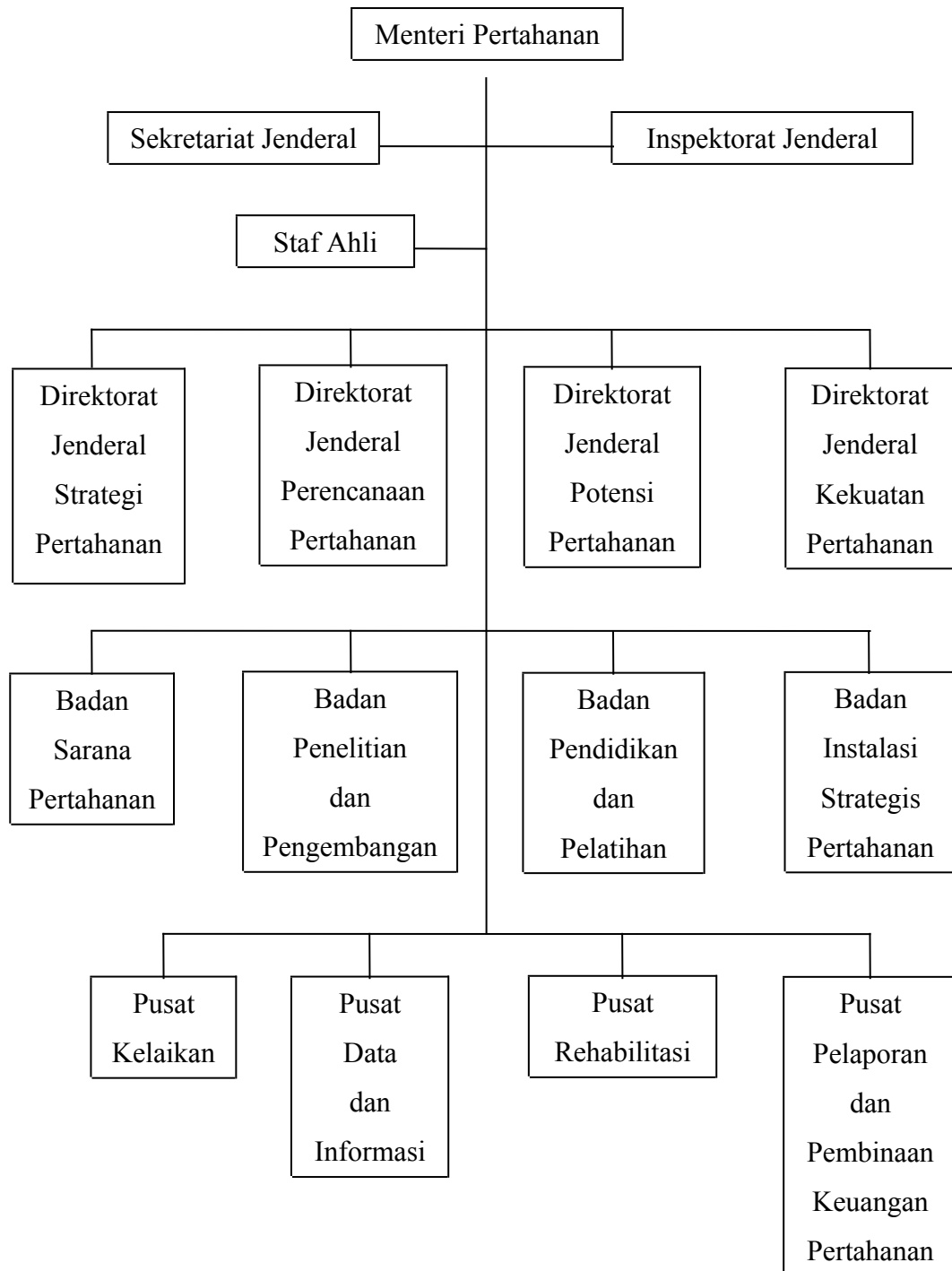
#### **4.1 Profil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kemhan RI, merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Organisasi Kemhan RI disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan di mana terdapat sejumlah perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pertahanan. Kemhan RI saat ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.

Kemhan RI memiliki visi dan misi sebagai pedoman pada setiap pelaksanaan kegiatannya. Visi Kemhan RI yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kemhan RI memiliki beberapa Misi, salah satunya yaitu “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”. Tugas Kemhan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemhan RI mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**



(Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Berdasarkan pada struktur organisasi di atas, dapat diketahui bahwa Menteri Pertahanan sebagai pimpinan tertinggi di Kemhan RI mempunyai tugas dan kewajiban untuk memantau dan mengarahkan kegiatan operasional pegawai supaya sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemhan RI. Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan, serta pengawasan lainnya di lingkungan Kemhan RI. Staf ahli yang terdiri atas staf ahli bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan bertugas memberikan rekomendasi isu strategis kepada Menteri terkait bidang masing-masing. Unit kerja lainnya seperti direktorat, badan, dan pusat bertugas membantu Menteri dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Menteri Pertahanan sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Kemhan RI juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Keputusan yang diberikan dari Presiden diteruskan kepada seluruh pegawai sesuai bidang keahliannya. Dalam penentuan pembagian keputusan ini Menteri Pertahanan dibantu oleh Staf Ahli yang mana dapat memberikan rekomendasi, usulan, dan saran yang dibutuhkan. Keputusan yang sudah dibuat oleh Menteri diteruskan kepada bawahan melalui surat keputusan dan disposisi.

## **4.2 Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Balitbang Kemhan RI adalah salah satu unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Balitbang Kemhan RI saat ini berlokasi di Jalan Jati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Balitbang Kemhan RI mempunyai tugas yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Balitbang Kemhan RI menyelenggarakan fungsi yaitu:

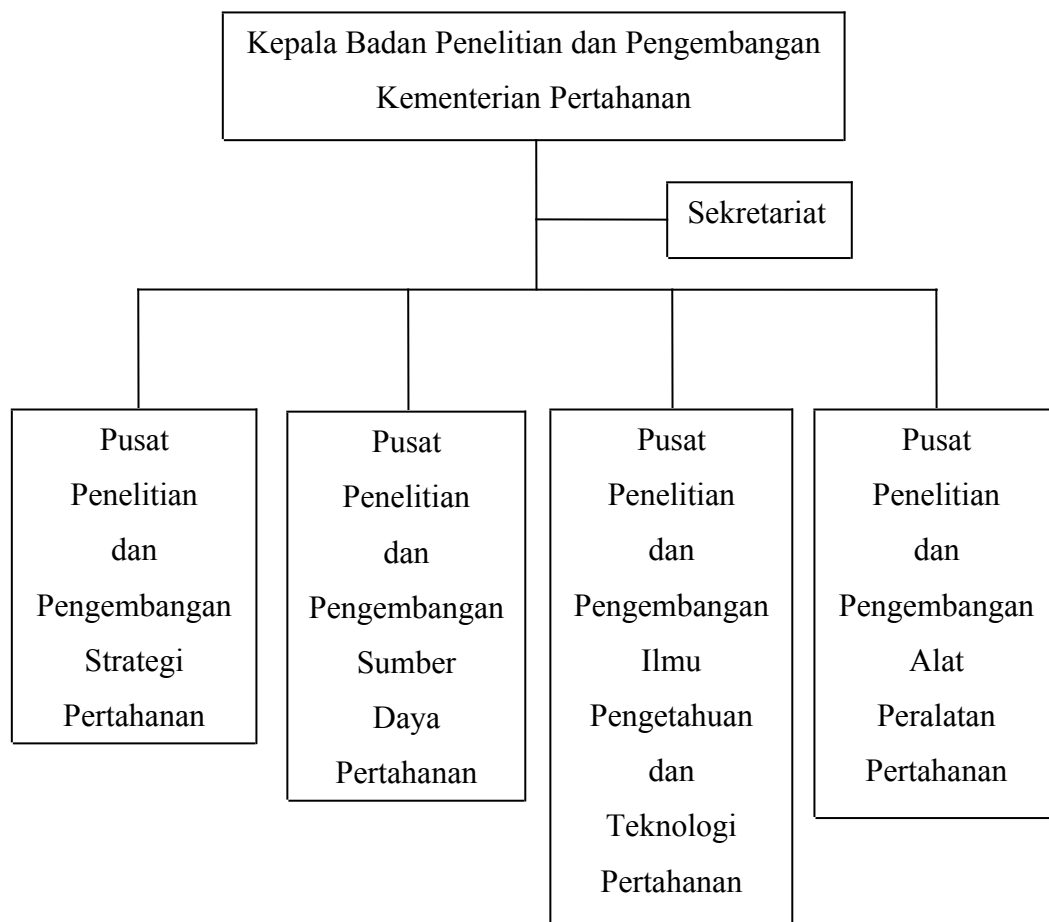
1. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
4. Pelaksanaan administrasi Balitbang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan, Balitbang Kemhan RI memiliki visi dan misi sebagai pedomannya. Visi Balitbang Kemhan RI yaitu “Terwujudnya pertahanan Negara yang tangguh”. Sedangkan Misi Balitbang Kemhan RI yaitu “Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa”.

Balitbang Kemhan RI memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan**

**Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**



(Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Berdasarkan pada struktur organisasi di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) sebagai pimpinan tertinggi di Balitbang Kemhan RI mempunyai tugas dan kewajiban untuk memantau dan mengarahkan kegiatan operasional pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekretariat terdiri atas Bagian Program dan Laporan, Bagian Data Informasi, Bagian Umum, Bagian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap badan tersebut mempunyai tugas seperti menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Balitbang Kemhan RI. Unit kerja yang disebut Pusat bertugas membantu Kabalitbang dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Kabalitbang sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Balitbang Kemhan RI juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Keputusan yang diberikan dari Menteri Pertahanan RI diteruskan kepada seluruh pegawai sesuai bidang keahliannya. Dalam penentuan pembagian keputusan ini Kabalitbang dibantu oleh Sekretariat dan staf terkait yang mana dapat memberikan rekomendasi, usulan, dan saran yang dibutuhkan. Keputusan yang sudah dibuat oleh Kabalitbang diteruskan kepada bawahan melalui surat keputusan dan disposisi, kurang lebih sama seperti prosedur yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI.

#### **4.3 Kondisi Pengelolaan Arsip di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Arsip yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Balitbang Kemhan RI) sebagian besar berupa surat, laporan, dan

dokumen lainnya. Ada juga bentuk lain seperti rekaman, foto, dan sebagainya tetapi ditempatkan di unit kerja terpisah dari yang berbentuk kertas. Arsip dalam bentuk kertas disimpan di unit kerja Sekretariat Bagian Umum, sedangkan arsip bentuk lainnya disimpan di unit kerja Bagian Data Informasi. Asas kearsipan yang diterapkan yaitu asas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi yang merupakan salah satu asas kearsipan dengan cara arsip-arsip yang ada sebagian dikumpulkan di satu tempat dan sebagian lainnya disebar atau dilimpahkan kepada masing-masing unit kerja.

Sistem penyimpanan arsip di Bagian Umum menggunakan *ordner* atau *folder* dan diletakkan di lemari arsip besi, serta menerapkan sistem klasifikasi berdasarkan gabungan antara subjek/bidang dan tahun pembuatan. Sedangkan sistem penyimpanan arsip pada unit kerja lainnya menggunakan *ordner* yang diletakkan di lemari kayu. Beberapa arsip juga dipindahkan ke kantor pusat (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) apabila dibutuhkan seperti laporan-laporan dan arsip-arsip yang sudah habis masa retensinya. Pembuatan daftar arsip masih menggunakan jenis manual, tetapi sudah mulai beralih ke digital. Arsiparis yang berlatar belakang di bidang kearsipan juga mulai masuk.

Sistem mekanisme daur hidup arsip di Balitbang Kemhan RI adalah sebagai berikut:

1. Tahap penciptaan

Proses pada tahap penciptaan di Balitbang Kemhan RI yaitu dokumen diciptakan oleh masing-masing unit kerja. Kemudian dokumen diurus oleh Staf Tata Usaha

untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya dokumen disimpan di tempat penyimpanan dan disebut sebagai arsip.

2. Tahap penggunaan

Arsip dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dalam rangka menjalankan tugas, termasuk pimpinan apabila membutuhkan arsip sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Tahap penyimpanan aktif

Arsip yang masih sering dipergunakan dalam berbagai kegiatan disimpan di tempat penyimpanan dengan status aktif.

4. Tahap pemindahan menjadi penyimpanan inaktif

Arsip yang sudah tidak lagi digunakan tetapi masih perlu disimpan untuk berjaga-jaga kemudian dipindahkan menjadi inaktif.

5. Tahap pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip historis

Tahap pemusnahan dan pemindahan diserahkan kepada kantor pusat (Kemhan RI). Petugas Balitbang Kemhan RI membuat nota dinas untuk meminta data arsip yang perlu diserahkan. Kemudian petugas meminta retensi arsip ke Staf Tata Usaha Sekretaris Jenderal, dan selanjutnya dibuat berita acara penyerahan arsip.

Kondisi kearsipan yang baik dapat memberikan pengaruh dan manfaat bagi beberapa unit kerja, terutama yang menggunakan arsip. Contohnya dalam penelitian ini adalah para pimpinan dan pihak terkait dalam kegiatan pengambilan keputusan.



#### **4.4 Penggunaan Arsip dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Kepala Balitbang Kemhan RI melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan berdasarkan arahan dan keputusan dari Menteri Pertahanan RI, yang mana disampaikan melalui surat keputusan dan disposisi. Dari arahan tersebut pimpinan melaksanakan pengambilan keputusan dengan pertimbangan seperti mengadakan rapat dan merujuk kepada berbagai informasi terkait. Sumber informasi yang dapat digunakan salah satunya yaitu arsip.

Arsip dapat dimanfaatkan sebagai rekaman dan alat pengingat dalam keselenggaraan kegiatan kerja pada suatu organisasi. Maka dari itu arsip dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam melakukan pengambilan keputusan. Pimpinan ataupun pegawai lainnya bisa saja lupa terhadap suatu informasi yang ingin digunakan di dalam menjalankan tugasnya, karena daya ingat manusia tidak bisa mengingat kembali banyak informasi dalam waktu singkat.

Arsip juga dapat digunakan sebagai alat bukti autentik dan dapat diproses secara hukum. Apabila keputusan yang diambil oleh pimpinan mengalami hambatan teknis, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menyajikan arsip yang ada. Oleh karena itu, arsip memiliki peranan penting dalam kegiatan organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Kegiatan pengelolaan arsip sebagai kegiatan kerja yang membantu menyediakan arsip kepada pimpinan, kondisinya perlu diperhatikan dan diusahakan sesuai dengan standar kearsipan. Hal ini bertujuan supaya baik proses pengambilan keputusan maupun kegiatan kerja secara keseluruhan tidak terhambat serta dapat berjalan dengan baik dan efisien.